

**DEMOKRASI PADA MASA ORDE BARU DALAM KONTEKS  
STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT JAWA**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Filsafat Islam  
dalam Ilmu Ushuluddin

Oleh :

**Raden Jamal**

NIM: 9951 3053

**JURUSAN AQIDAH FILSAFAT  
FAKULTAS USHULUDDIN  
IAIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2003**

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 23 Juli 2003

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

IAIN Sunan Kalijaga

di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Raden Jamal  
NIM : 99513053  
Jurusan : Aqidah Filsafat  
Judul Skripsi : **DEMOKRASI PADA MASA ORDE BARU DALAM  
KONTEKS STRATIFIKASI SOSIAL  
MASYARAKAT JAWA**

Maka selaku Pembimbing/Pembantu Pembimbing kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqosyahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

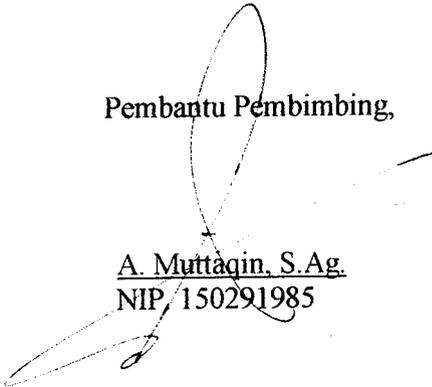
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Drs. M. Damami, M.Ag.  
NIP. 150202822

Pembantu Pembimbing,



A. Muttaqin, S.Ag.  
NIP. 150291985



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA

**FAKULTAS USHULUDDIN**

Jl. Marsda Adi Sucipto, Telp./Fax. (0274) 512156, Yogyakarta

**P E N G E S A H A N**

**Nomor. : IN/I/DU/PP.00.9/ 786 /2003**

Skripsi dengan judul : **DEMOKRASI PADA MASA ORBA DALAM KONTEKS  
STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT JAWA**

Diajukan oleh :

1. Nama : Raden Jamal
2. NIM : 99513053
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : AF

Telah dimunaqosyahkan pada hari: Selasa, tanggal: 5 Agustus 2003 dengan nilai: 72,5 (B-) dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu: Ushuluddin

**PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH**

Ketua Sidang

**Drs. H.M. Achmadi Anwar, M.M.**  
NIP. 150058075

Pembimbing / merangkap Penguji

**Drs. Mohammad Damami, M.Ag.**  
NIP. 150202822

Penguji I

**Drs. Sudin, M. Hum.**  
NIP. 150239744

Sekretaris Sidang

**Drs. Abdul Basir Solissa, M.Ag.**  
NIP. 150235497

Pembantu Pembimbing

**Ahmad Muttaqin, S.Ag.**  
NIP. 150291985

Penguji II

**Ustadzi Hamzah, S.Ag.**  
NIP. 150298987

Yogyakarta, 6 Agustus 2003  
**DEKAN**  
  
**Dr. Djam'annuri, M.A.**  
NIP. 150 182 860



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين.  
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل  
على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT. Dzat yang selalu mencurahkan kasih dan sayang-Nya pada manusia. Atas berkat inayah dan kasih-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Tanpa-Nya pekerjaan ini menjadi sia-sia. Oleh karena itu penulis mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas curahan kasih-Nya.

Disamping itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Aqidah Filsafat.
3. Bapak M. Damami, M.Ag dan A. Muttaqin, S.Ag., selaku pembimbing skripsi yang dengan sungguh-sungguh telah membimbing dan mengarahkan penyusunan sejak awal sampai terwujudnya skripsi ini.
4. Staf pengajar dan karyawan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Orang tua yang selalu mengayomi dan memberi restunya.
6. Keluarga; saudara-saudara baik yang ada di Gresik maupun yang di Yogyakarta, yang selalu memberikan motivasi baik material maupun spiritual.
7. Dik Nor, Dayat, Muhib dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Selanjutnya penyusun menyadari pula, bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan demi menghantarkan skripsi ini mendekati kata sempurna sebagaimana yang diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga Allah SWT membalas budi baik tersebut dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amien.

Yogyakarta, 16 Juli 2003

Penyusun



Raden Jamal

NIM. 9951 3053

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas Demokrasi pada Masa Orde Baru dalam Konteks Stratifikasi Sosial Masyarakat Jawa. Kajian ini menarik karena meskipun kekuasaan Orde Baru telah diberi acuan UUD'45 yang cukup demokratis, namun dalam prakteknya kekuasaan Orde Baru masih menampilkan kesan kediktatoran. Kekuasaan terakumulasi dan terpusat kepada seorang eksekutif serta tidak terdistribusikan kepada kekuatan-kekuatan politik alternatif. Penguasa memposisikan dirinya sebagai *patronage* sementara rakyat diposisikan sebagai pihak tergantung pada penguasa *client*.

Dalam penelitian ini pembahasan akan diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan yaitu bagaimana stratifikasi sosial masyarakat Jawa dan bagaimana kaitan antara stratifikasi sosial masyarakat Jawa dengan kepemimpinan Orde Baru. Agar kedua permasalahan di atas dapat dijawab dengan tepat, maka dalam penelitian ini akan digunakan metode analisis kualitatif, komparatif dan generalisasi.

Selanjutnya, setelah diadakan kajian yang cukup komprehensif maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Stratifikasi sosial masyarakat Jawa terbagi secara hierarkis menjadi dua bagian, yaitu: *wong gedhe* (orang besar) dan *wong cilik* (orang kecil). Golongan pertama dihuni bangsawan dan *priyayi*. *Priyayi* pada dasarnya adalah mereka yang menduduki birokrasi kerajaan dan masih mempunyai ikatan geneologis dengan raja. Namun dalam perkembangan selanjutnya, konsep *priyayi* ini mengalami perluasan makna. Setelah kekuasaan kerajaan menurun dan diganti oleh kekuasaan pemerintah kolonial, konsep *priyayi* juga digunakan untuk menunjukkan mereka yang duduk di birokrasi pemerintah kolonial, meskipun mereka ini bukan berasal dari keturunan bangsawan. Untuk membedakan keduanya, yang pertama disebut sebagai *priyayi luhur* sedangkan yang kedua dinamakan *priyayi cilik*.

Sementara golongan *wong cilik* adalah rakyat pada umumnya. Pada dasarnya mereka ini heterogen, karena terdiri dari berbagai macam kalangan seperti petani, pedagang, tukang, kuli, pengangguran dan lain sebagainya.

2. Keterkaitan antara stratifikasi sosial masyarakat Jawa dan kepemimpinan Orde Baru adalah bahwa stratifikasi sosial masyarakat Jawa itu telah meligitimasi praktek kekuasaan rezim itu. Rakyat, karena merasa sebagai *wong cilik*, menerima dengan ikhlas atas kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa Orde Baru dan menerima begitu saja dijadikan sebagai pihak yang tuna kuasa, sementara di pihak lain, kekuasaan sang penguasa makin kokoh dan kuat.

Berdasarkan hal di atas, maka tidak mengherankan jika demokrasi yang merupakan amanat *founding father* dan UUD'45 sangat sulit dijalankan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II STRATIFIKASI SOSIAL MASYARAKAT JAWA.....</b>	<b>15</b>
A. Batasan Masyarakat Jawa.....	15
B. Struktur Sosial Masyarakat Jawa.....	17

C. Tatakrama.....	27
1. Tatakrama Tingkah Laku .....	27
2. <i>Unggah-ungguhing Basa</i> .....	32
 BAB III KEKUASAAN DALAM NEGARA DEMOKRASI .....	38
B. Hakekat Kekuasaan Demokratis.....	38
C. Demokrasi Sebagai Pilihan Bangsa.....	49
1. Demokrasi Pada Masa Pergerakan.....	52
2. Demokrasi Menurut Pancasila dan UUD'45.....	58
 BAB IV KEPEMIMPINAN POLITIK DAN DEMOKRASI PADA MASA ORDE BARU.....	61
A. Jawanisasi Kekuasaan.....	61
B. Kepemimpinan Politik: Orde Baru Sebagai Replika Masa Mataram	72
1. Kepemimpinan Politik Raja Jawa .....	75
2. Kepemimpinan Politik Orde Baru.....	80
3. Kesamaan Gaya Kepemimpinan .....	84
C. Stratifikasi Sosial Masyarakat Jawa dalam Praktek Kepemimpinan Orde Baru .....	85
 BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran-Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA.....	97
CURRICULUM VITAE .....	101



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak didirikan, negara ini telah lima kali mengalami pergantian pemerintahan. Diantara kelima pemerintahan itu, Orde Baru merupakan pemerintahan yang paling lama berkuasa, yaitu selama 32 tahun. Tidak bisa dipungkiri bahwa selama berkuasa itu, Orde Baru telah mencapai banyak prestasi di berbagai bidang. Kehidupan politik yang stabil, keutuhan negara RI, keamanan dan ketertiban yang selalu terjaga serta pertumbuhan ekonomi yang sangat mengagumkan,<sup>1</sup> merupakan sederetan prestasi yang perlu dicatat di sini.

Meskipun demikian, tidak ada gading yang tidak retak. Begitu pula dengan rezim Orde Baru. Disamping sederetan prestasi yang dicapainya, banyak pula kekurangan yang mereka wariskan. Diantara kekurangan itu adalah belum terlaksananya atau mungkin tepatnya tidak ada keinginan baik atau *good will* dari pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis yang telah diamanatkan UUD'45 dan para pendiri bangsa ini, *Founding Fathers*<sup>2</sup> dengan baik dan konsisten.

---

<sup>1</sup> Abdul Gafur, *Pak Harto Pandangan dan Harapan* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), hlm. 310.

<sup>2</sup> Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman* (Jakarta: PT.Pustaka LP3ES, 1995), hlm. 113.

Indikasi yang bisa ditemukan adalah sistem kekuasaan yang hanya berputar dan berpusat pada seorang eksekutif serta sistem kekuasaan juga tidak terdistribusi kepada rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan sebenarnya.<sup>3</sup> Kekuasaan politik yang hakekatnya milik rakyat telah beralih menjadi kekuasaan rezim penguasa dan rakyat menjadi pihak yang tuna kuasa. Penguasa dapat mematahkan kekuatan oposisi rakyat dengan mengatasnamakan negara. Sebaliknya, rakyat tidak dapat mengatasnamakan negara ketika melawan terhadap kesewenang-wenangan penguasa. Penguasa dapat berbuat apa saja tanpa merasa bertanggungjawab kepada siapapun. Begitu juga terhadap pendefinisian istilah rakyat. Penguasa memegang hak monopoli terhadap pendefinisian istilah ini. Sementara rakyat kehilangan haknya. Penguasa sering mendefinisikan istilah rakyat ini sebagai sesuatu yang abstrak atau bahkan absurd. Sehingga kadangkala istilah rakyat itu jauh dari realitas atau bahkan seakan-akan tidak mempunyai realitas. Sebagai konsekuensinya rakyat harus siap menerima perlakuan kesewenang-wenangan dari penguasa.<sup>4</sup>

Sementara itu, kritik dan masukan yang merupakan kekuatan oposisi dan sebagai kekuatan sinergi dalam sebuah kekuasaan dianggap angin lalu yang kalau membahayakan diatasi secara represif. Kredo “bebas dan bertanggungjawab” dipakai untuk membunuh kebebasan rakyat dalam

---

<sup>3</sup> Carol C. Gould, *Demokrasi Ditinjau Kembali*, alih bahasa Samudra Wibawa (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993), hlm. 4.

<sup>4</sup>Zainuddin Maliki, *Penaklukan Negara Atas Rakyat Studi Resistensi Petani Berbasis Religio Politik Santri Terhadap Negeranisasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. xiv.

beraspirasi dan berkreasi. Konsep “Normalisasi Kehidupan Kampus” (NKK) dipakai untuk menjauhkan mahasiswa dan kaum intelektual dari politik, sehingga penguasa bebas berperilaku nyaris tanpa kritik.

Manusia Orde Baru adalah manusia yang kehilangan otonominya. Sebagai makhluk yang bebas, ia telah terenggut kebebasannya oleh penguasa. Ia telah menemukan dirinya pada pilihan yang tanpa alternatif. Bersamaan dengan itu, meminjam istilah Hegel,<sup>5</sup> penguasa telah mendudukkan dirinya sebagai “Roh Objektif” yang tahu dan mengerti semua apa yang menjadi kepentingan dan kebutuhan rakyat. Sementara itu di sisi lain, penguasa telah menempatkan dirinya di atas segala-galanya, bagaikan menara gading yang sangat susah dan sulit, kalau tidak boleh dikatakan tidak bisa dijangkau oleh rakyat. Posisinya adalah mirip seorang dewa, yang suci, sakral dan tidak tersentuh sedikitpun oleh siapapun.

Gaya kepemimpinan yang hegemonis, eksploitatif, alienatif dan elitis ini bisa juga ditemukan pada tradisi kepemimpinan raja-raja Jawa. Menurut Anderson, konsep kekuasaan Jawa pada dasarnya bersifat konkrit, besarannya konstan dan sumbernya homogen, yaitu melalui keturunan.<sup>6</sup> Konsep kekuasaan yang menggambarkan begitu kuat posisi seorang penguasa adalah sesuatu yang tidak mengherankan, sebab pada praktiknya, kekuasaan seorang

---

<sup>5</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 248.

<sup>6</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1989), hlm. 106.

raja mendapat legitimasi berlapis-lapis. Legitimasi yang dimaksud di sini adalah legitimasi religius dan legitimasi sosiologis.

Legitimasi religius di sini berarti bahwa hakikat kekuasaan itu bersifat adi-duniawi dan adi-manusiawi, berasal dari alam gaib atau yang termasuk Yang Ilahi. Manusia yang berkuasa dengan demikian bukan manusia biasa lagi melainkan ikut termasuk alam adi duniawi. Perebutan dan pemakaian kekuasaan tidak membutuhkan tuntutan etis, melainkan jika penguasa itu bisa menunjukkan bahwa ia betul-betul memiliki kekuasaan yang religius atau adi-kodrati.<sup>7</sup>

Untuk menjelaskan masalah ini, penjelasan akan dimulai dari perspektif pemikiran politik Jawa yang mendasarkan diri pada dua landasan.<sup>8</sup> *Pertama*, dalam pemikiran Jawa diakui adanya paralelisme antara makrokosmos (*Jagad Gedhe*) dengan mikrokosmos (*Jagad Cilik*), antar dunia “para dewa” atau “dunia Tuhan” yang bersifat sakral dengan dunia manusia yang bersifat profan. *Kedua*, ada kebutuhan interaksi antara makrokosmos (*Jagad Gedhe*) dan mikrokosmos (*Jagad Cilik*) itu. Kedua kosmos itu dianggap “menyatu” secara korelatif.

Berdasarkan landasan tersebut secara hierarkis, raja berada dalam puncak mikrokosmos, pusat kerajaan manusia di dunia. Ia dipercaya sebagai satu-satunya medium yang menghubungkan dunia makrokosmos dan

---

<sup>7</sup> Franz Magnis Suseno, *op. cit.*, hlm. 42.

<sup>8</sup> R. Eep Syaifullah Fatah, *Masalah dan Perspektif Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Galia Indonesia, 1994), hlm. 36.

mikrokosmos. Ia dipandang sebagai mediator antara manusia dengan Tuhan; dan ia juga merupakan refleksi Tuhan.

Sementara legitimasi sosiologis berarti bahwa kewenangan raja untuk memegang kekuasaan dan menjalankannya telah mendapat pengesahan secara sosial.<sup>9</sup> Dengan kata lain, rakyat menerima begitu saja terhadap tatanan sosial yang menempatkan dirinya pada posisi di bawah, sementara raja pada posisi atas. Masyarakat Jawa menganggap bahwa tatanan masyarakat yang berstratifikasi secara hierarkis itu sebagai tata tertib dan keteraturan yang berasal dan bersifat adi-kodrati dan ahistoris. Oleh karena itu, sikap yang harus ditunjukkan dan dikembangkan adalah penyesuaian diri, ketaatan, kesabaran, keikhlasan dan penghormatan terhadap ketentuan yang ada.<sup>10</sup>

Pandangan masyarakat Jawa yang menganggap tatanan sosial sebagai sesuatu yang ahistoris seperti di atas, pada akhirnya menimbulkan implikasi yang serius terhadap pelaksanaan kekuasaan. Raja Jawa yang menduduki posisi teratas dalam struktur sosial, menjadikan dia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi secara mutlak tanpa ada kontrol dan oposisi.<sup>11</sup> Apa yang diucapkan dan diperintahkan oleh raja adalah sabda dan aturan yang menuntut akan ketundukan bagi bawahannya termasuk rakyatnya. Sementara itu di sisi

---

<sup>9</sup> Franz Magnis Suseno, *op. cit.*, hlm. 58.

<sup>10</sup> K.J.Veeger, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.4.

<sup>11</sup> G.Moedjanto, *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram* (Yogyakarta: Kanisius, 1987), hlm.78.

lain, rakyat yang notabene berada pada hierarki yang paling bawah, sikap yang harus ditunjukkannya adalah sikap hormat dan patuh tanpa *reserve*.

Berdasarkan dua legitimasi di atas (legitimasi religius dan legitimasi sosiologis), maka tidak mengherankan kalau kekuasaan raja begitu kuat dan dapat bertahan dalam interval waktu yang cukup lama. Raja bebas dan leluasa menjalankan kekuasaannya tanpa ada yang berani mengganggu dan mengkritiknya. Raja juga berhak dan bebas mewariskan kekuasaannya kepada keturunannya. Siapa yang berani menentang suksesi ini, maka peranglah jalannya.

Memang, legitimasi adalah problem urgen dalam suatu kekuasaan. Legitimasi merupakan dasar dijalankannya kekuasaan. Legitimasi juga merupakan alat pengesah seseorang untuk memegang kendali kekuasaan. Di dalam masyarakat yang sumber kekuasaan masih homogen dan pola pikir masyarakat masih sederhana, tentu legitimasi kekuasaannya juga bersifat sederhana. Sebaliknya, semakin menyebar sumber-sumber kekuasaan dan semakin kompleks permasalahan dan majunya pola pikir suatu masyarakat, maka dengan sendirinya legitimasi pun makin menuntut penyesuaian. Legitimasi yang sederhana dan konservatif, tentu tidak relevan lagi.

Max Weber membagi legitimasi menjadi tiga bagian,<sup>12</sup> yaitu: *satu*, legitimasi tradisional, yaitu keyakinan dalam suatu masyarakat tradisional bahwa pihak yang menurut tradisi lama memegang pemerintahan memang berhak untuk memerintah, misalnya kaum bangsawan atau keluarga raja. *Dua*,

---

<sup>12</sup> Franz Magnis Suseno, *loc. cit.*

legitimasi kharismatik, berdasarkan rasa kagum, hormat, cinta atau takut masyarakat terhadap seorang pribadi yang sangat mengesankan sehingga mereka dengan sendirinya bersedia untuk taat kepadanya, misalnya kalau seseorang dianggap mempunyai kesaktian. *Tiga*, legitimasi rasional-legal, berdasarkan kepercayaan pada tatanan hukum rasional yang melandasi kedudukan seorang pemimpin. Legitimasi yang terakhir inilah yang biasanya menjadi motif masyarakat modern, tidak terkecuali penguasa Orde Baru.

Sampai di sini sekilas tampak, bahwa terjadi paralelisme antara pola kepemimpinan Orde Baru dan raja-raja Jawa kuno. Benarkah demikian adanya?, Benarkah kekuasaan Orde Baru menggunakan legitimasi sosiologis sebagai penopang kekuasaannya sehingga ia dapat bertahan begitu lama?, Bukankah dengan makin majunya masyarakat, legitimasi konservatif akan ditinggalkan dan hal ini yang dilakukan oleh Orde Baru dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum yang berarti ia telah menggunakan legitimasi legal-rasional?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi sekaligus merupakan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Penelitian ini menjadi menarik, sebab walaupun kekuasaan Orde Baru telah diberi acuan UUD'45 yang cukup demokratis, namun dalam prakteknya kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan bersifat otoriter. Kajian ini membatasi diri pada demokrasi politik; yang menyetujui politik diartikan sebagai kekuasaan.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan skripsi yaitu:

1. Bagaimana stratifikasi sosial masyarakat Jawa?
2. Bagaimana kaitan antara stratifikasi sosial masyarakat Jawa dengan kepemimpinan politik Orde Baru?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah:

*Pertama*, karena kajian ini ingin mengetahui demokrasi dalam konteks stratifikasi sosial masyarakat Jawa, maka terlebih dahulu yang ingin diketahui adalah kondisi sebenarnya dari stratifikasi sosial masyarakat Jawa. Tanpa mengetahui dengan benar tentang permasalahan ini, pada akhirnya akan mengaburkan dan mengacaukan arah pembahasan.

*Kedua*, ingin menelusuri keterkaitan antara stratifikasi sosial masyarakat Jawa dengan pola kepemimpinan pada masa Orde Baru. Tujuan ini sekaligus merupakan perhatian utama dalam pembahasan skripsi ini.

#### D. Tinjauan Pustaka.

Sepanjang pengetahuan penulis, telah banyak tulisan yang telah membahas tema di atas. Umumnya, tulisan-tulisan itu dalam pembahasannya menggunakan pendekatan kultural. Pendekatan ini oleh para ahli dinilai tidak relevan dan telah ketinggalan jaman. Menurut mereka, pendekatan kultural itu terlalu simplisit dan tidak dapat menjelaskan apa-apa tentang fenomena politik.

Meskipun demikian, menurut Afan Gaffar, bukan berarti pendekatan kultural tidak berguna lagi. Pendekatan kultural masih sangat diperlukan, apalagi untuk kasus Indonesia. Sebab, ada gejala politik tertentu yang hanya dapat dijelaskan dengan pendekatan kultural. Model pembentukan dukungan dan mobilisasi politik pada masa Pemilu misalnya, akan sangat tepat dengan menggunakan pendekatan kultural daripada pendekatan yang lain.

Jadi, jelas bahwa pendekatan kultural sampai sekarang masih diperlukan dan penting sifatnya. Gaya kepemimpinan Orde Baru yang otoriter dan sering menyitir ungkapan-ungkapan Jawa misalnya, barangkali lebih dapat dipahami keterkaitan keduanya jika menggunakan pendekatan kultural. Berdasarkan pada hal di atas, maka tidak mengherankan kalau banyak tulisan yang membahas kepemimpinan Orde Baru dikaitkan dengan budaya Jawa. Diantara tulisan-tulisan itu adalah :

Buku *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, karangan Afan Gaffar. Afan Gaffar menerangkan bahwa budaya politik yang menonjol di Indonesia pada masa ORBA masih diwarnai dengan feodalisme. Menurut

Gaffar, minimal ada tiga kecenderungan yang melekat pada budaya politik Indonesia pada masa ORBA yaitu hierarki yang tegar, kecenderungan *patronage* dan kecenderungan *neo-patrimonialistik*. Ketiga kecenderungan di atas menggambarkan bahwa pola hubungan yang terjadi pada masa ORBA tidak berjalan secara simetris. Penguasa menempati posisi yang sangat kuat, sementara rakyat dalam kondisi tidak berdaya. Berdasarkan kondisi seperti ini, lanjut Gaffar, maka mengharapkan kepemimpinan demokratis pada masa ini adalah sesuatu yang mustahil.<sup>13</sup>

Tulisan-tulisan lain yang membahas tema di atas adalah artikel yang berjudul “Rekonstruksi dan Reorientasi Budaya politik” karangan Kusnanto Anggoro. Artikel ini dimuat dalam buku yang berjudul *Revitalisasi Sistem politik Indonesia* yang diedit oleh J. Soedjati Djiwandono dan T. A. Legowo.

Dalam artikel ini Anggoro menjelaskan bahwa tradisi pribumi (Jawa) merupakan budaya dominan dalam praktik kenegaraan pada masa ORBA. Hal ini, menurut Anggoro bisa diselesaikan pada kecenderungan pola kepemimpinan ORBA yang mengarah kepada pola hubungan kekuasaan *neo-patrimonialis*. Dengan mengutip Weber, Anggoro menjelaskan bahwa pola kepemimpinan *neo-patrimonialis* ditandai oleh kuatnya penguasa mengontrol kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingannya sendiri. Lebih lanjut, Anggoro menjelaskan bahwa pola kepemimpinan seperti ini pada akhirnya akan melahirkan pola hubungan bapak-anak buah atau *kawula-gusti* atau

---

<sup>13</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 95-118.

*patron* dan *klient*. Konsekuensi dari pola hubungan seperti ini adalah munculnya sosok ketergantungan sang rakyat pada sang bapak. Sang bapak (*patronage*) memberikan perlindungan, bantuan material dan spiritual pada sang anak (*client*), sebagai imbalannya, sang anak memberikan loyalitas kepada sang bapak.<sup>14</sup>

Sampai di sini yang membedakan tulisan-tulisan di atas dengan penelitian ini adalah bahwa tulisan-tulisan di atas hanya menerangkan pola hubungan kekuasaan Orde Baru dan tidak menerangkan mengapa kekuasaan Orde Baru bisa bertahan begitu lama.

Pakar lain yang membahas tema ini adalah Umar Kayam dengan judul artikel “Feodalisme: dari Model Mataram sampai Model Beambten-Staat” yang dimuat di jurnal kebudayaan dan peradaban *Ulumul Qur’an* edisi ke-4/VII/1997. Dalam artikel itu, Kayam menjelaskan bahwa meskipun bangsa ini lebih dari setengah abad telah memproklamasikan kemerdekaannya dengan mengacu semangat kebebasan dan egalitarianisme, namun dalam kenyataannya nilai-nilai feodalisme masih nampak kuat mengakar di tengah-tengah masyarakat dan pada akhirnya sangat mempengaruhi jalannya proses demokrasi di negeri tercinta ini. Gejala ini bisa dilihat masih kuatnya posisi eksekutif dengan menguasainya secara efektif semua infrastruktur sistem kontrol seperti sistem peradilan dan media massa.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> J. Soedjati Djiwandono dan T.A. Legowo (ed.), *Revitalisasi Sistem Politik Indonesia*, (Jakarta: CSIS, 1996), hlm. 211.

<sup>15</sup> Umar Kayam, “Feodalisme: dari Model Mataram sampai Model Beambten-Staat”, dalam *Ulumul Qur’an* edisi 4/VII/1997, hlm. 5.

Lebih lanjut Kayam menguraikan dua macam model feodalisme yang dapat digunakan untuk melacak nilai-nilai feodalisme. Yaitu model feodalisme mataram dan model *Beambten-staat* kolonial. Kedua model ini dengan keunikannya masing-masing bekerjasama bahu-membahu mengeksploitasi rakyat kecil demi memenuhi kepentingannya masing-masing.

Di sini jelas bahwa Kayam dalam pembahasannya telah meluas tanpa batasan budaya mana yang ia anggap sebagai feodal. Untuk itulah pembahasan skripsi ini akan membatasi diri pada stratifikasi sosial sebagai bagian dari budaya Jawa. Kemudian stratifikasi sosial itu kami kaitkan dengan kepemimpinan politik Orde Baru.

## E. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian literer, yang berarti data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kepustakaan seperti buku, majalah, ensiklopedi, dan sebagainya.

Penelitian ini menggunakan beberapa buku sebagai acuan utama sementara yang lain merupakan penunjang. Sebagai acuan utama berarti bahwa data yang terdapat dalam skripsi ini sebagian besar diperoleh dari buku-buku tersebut. Buku-buku yang dimaksud di sini adalah *Serpihan Budaya Feodal* karya Suhartono W. Pranoto, *Usaha dan Bina Negara di Jawa Masa Lampau* *Studi Tentang Masa Mataram II Abad XI-XIX* karya Soemarsaid Moertono dan *Ruang Batin Masyarakat Indonesia* karya Niels Mulder.

Ketika seluruh data terkumpul akan dilakukan *editing* (pemeriksaan) untuk mengetahui kelengkapan dan ketepatan data tersebut. Kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan masalah penelitian.

Lebih lanjut, setelah data itu diproses, lalu diadakan analisis kualitatif. Langkah ini perlu ditempuh untuk menggambarkan fenomena stratifikasi sosial dalam masyarakat Jawa dan pola kepemimpinan Orde Baru secara mendalam dan komprehensif. Langkah analisis kualitatif dilakukan dengan *pertama*, menemukan tema tertentu. *Kedua*, mencari hubungan yang logis antara satu tema dengan tema yang lain sehingga melahirkan kejelasan. Dalam mencari hubungan yang logis itu akan dilakukan baik dengan menggunakan logika berfikir deduktif maupun induktif. Selanjutnya, akan diadakan generalisasi dan komparasi terhadap kasus-kasus lain yang sejenis, sehingga menimbulkan kejelasan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Agar mendapat suatu hasil yang utuh dan sistematis, maka dalam penyusunan pembahasan ini akan digunakan sistematika bab perbab dengan rasionalisasi sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan secara argumentatif tentang pentingnya kajian yang dilakukan. Bagian ini mencakup latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mencoba menguraikan stratifikasi sosial dalam budaya Jawa yang meliputi batasan masyarakat Jawa, struktur sosial masyarakat Jawa, tata krama dan *unggah-ungguhing basa* sebagai dampak stratifikasi sosial.

Bab ketiga, membicarakan tentang kekuasaan dalam negara demokrasi. Bab ini mencoba menerangkan hakikat kekuasaan demokratis, demokrasi sebagai pilihan bangsa yang berisi demokrasi pada masa pergerakan dan demokrasi menurut pancasila dan UUD'45.

Bab keempat, dalam bab ini penulis berusaha membicarakan kepemimpinan politik dan demokrasi pada masa Orde Baru. Pada bab ini akan dijadikan titik tekan dalam pembahasan skripsi ini yang meliputi Jawanisasi politik dan kekuasaan, kepemimpinan politik: Orde Baru sebagai replika masa Mataram. Pada sub judul ini dibahas kepemimpinan politik raja Jawa, kepemimpinan politik Orde Baru dan kesamaan gaya kepemimpinan. Lebih lanjut bab ini akan membahas stratifikasi sosial masyarakat Jawa dalam praktek berdemokrasi.

Bab kelima, merupakan bab penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari skripsi ini, penyusun memberikan beberapa kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan di muka.

1. Stratifikasi sosial masyarakat Jawa terbagi secara hierarkis menjadi dua bagian, yaitu: *wong gedhe* (orang besar) dan *wong cilik* (orang kecil). Golongan pertama dihuni bangsawan dan *priyayi*. *Priyayi* pada dasarnya adalah mereka yang menduduki birokrasi kerajaan dan masih mempunyai ikatan geneologis dengan raja. Namun dalam perkembangan selanjutnya, konsep *priyayi* ini mengalami perluasan makna. Setelah kekuasaan kerajaan menurun dan diganti oleh kekuasaan pemerintah kolonial, konsep *priyayi* juga digunakan untuk menunjukkan mereka yang duduk di birokrasi pemerintah kolonial, meskipun mereka ini bukan berasal dari keturunan bangsawan. Untuk membedakan keduanya, yang pertama disebut sebagai *priyayi luhur* sedangkan yang kedua dinamakan *priyayi cilik*.

Sementara golongan *wong cilik* adalah rakyat pada umumnya. Pada dasarnya mereka ini heterogen, karena terdiri dari berbagai macam kalangan seperti petani, pedagang, tukang, kuli, pengangguran dan lain sebagainya.

2. Keterkaitan antara stratifikasi sosial masyarakat Jawa dan kepemimpinan Orde Baru adalah bahwa stratifikasi sosial masyarakat Jawa turut

meligitimasi praktek kekuasaan rezim itu. Rakyat, karena merasa sebagai *wong cilik*, menerima dengan ikhlas atas kekuasaan yang dijalankan oleh penguasa Orde Baru dan menerima begitu saja dijadikan sebagai pihak yang tuna kuasa, sementara di pihak lain, kekuasaan sang penguasa makin kokoh dan kuat. Sehingga, demokrasi yang merupakan amanat *founding father* dan UUD'45 sangat sulit dijalankan.

## **B. saran-saran**

Sekilas, kalau kita perhatikan praktek kekuasaan ala Orde Baru, mengharapkan demokrasi pada orde ini adalah hal yang mustahil. Meskipun demikian, bukan berarti kemudian kita sebagai generasi penerusnya menjadi pesimis. Salah satu upaya untuk menimbulkan kesadaran berdemokrasi ini adalah melalui pendidikan. Seperti yang telah diketahui bersama bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling efektif untuk memunculkan dan meningkatkan kesadaran akan kondisi seseorang.

Di samping itu, hal lain yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah pentingnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini penting, sebab UUD'45 yang kita punyai itu hanyalah bersifat sementara dan pembuatannya diselimuti oleh ketergesa-gesaan. Maka tidak mengherankan kalau secara substansial banyak pasal-pasal yang bertentangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Kusnanto. "Rekonstruksi dan Reorientasi Budaya Politik", dalam J. Soedjati Djiwandono dan T. A. Legowo. *Revitalisasi Politik Indonesia*. Jakarta: CSIS, 1996
- Anwar, Khaidir. *Beberapa Aspek Sosiokultural Masalah Bahasa* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995
- Baechler, Jean. *Demokrasi Sebuah Tinjauan Analitis*. alih bahasa Heru Hidayat. Yogyakarta: Kanisius, 2001
- Bakry, Noor MS. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta: Liberty Press, 1991
- Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlemen dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996
- Carter, Gwandolen M.. "Demokrasi dan Totalisme Dua Ujung dalam Spektrum Politik", alih bahasa Team Yayasan Obor Jakarta. Dalam Miriam Budiardjo (ed.). *Masalah Kenegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1980
- Cipto, Bambang. *Partai Kekuasaan dan Militerisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Dahl, Robert A. *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*. alih bahasa A. Rahman Tainuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992
- Damami, M. *Makna Agama dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: LESFI, 2000
- Eriyanto. *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni, Studi Pidato-Pidato Politik Soeharto*. Yogyakarta: Insist, 2000
- Fatah, R. Eep Syaifullah. *Masalah dan Perspektif Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Galia Indonesia, 1994
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999
- Geerd, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1989
- Gould, Carol C.. *Demokrasi Ditinjau Kembali*. alih bahasa Samudra Wibawa. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993

- Halim (ed.). *Golkar dan Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993
- Haris, Syamsuddin. *Demokrasi di Indonesia Gagasan dan Pengalaman*. Jakarta: PT.Pustaka LP3ES, 1995
- Imawan, Riswanda. *Membedah Politik ORBA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Isjwara, F. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Putra A. Bardin, 1999
- Kaelan. *Filsafat Bahasa Masalah dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Paradigma, 1998
- Kartodirdjo, Sortono (dkk.). *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993
- Kayam, Umar. "Feodalisme: dari Model Mataram sampai Model Beambten-Staat", dalam *Ulumul Qur'an*. edisi 4/VII/1997
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994
- Liddle, R. Willem. *Pemilu Orde Baru Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1994
- Lombard, Denys. *Nusa Jawa Silang Budaya Warisan Kerajaan-Kerajaan Kosentris III*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000
- M. Azhar. *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Maliki, Zainuddin. *Penaklukan Negara atas Rakyat Studi Resistensi Petani Berbasis Religio Politik Santri Terhadap Negeranisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999
- Margantoro, Y. B. (dkk.). *Sri Sultan Hamengku Buwono IX Meneguhkan Tahta untuk Rakyat*. Jakarta: PT. Grasindo, 1999
- Markoff, Johan. *Gelombang Demokrasi Dunia Gerakan Sosial dan Perubahan Politik*. alih bahasa Ari Setyaningrum. Yogyakarta: Putaka Pelajar, 2002
- Mas'oed, Mohtar dan Andrews, Colin Mac (ed.). *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000
- Moedjanto, G. *Konsep Kekuasaan Jawa Penerapannya oleh Raja-Raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius, 1987

- Moertono, Soemarsaid. *Negara dan Usaha Bina Negara di Jawa Masa Lampau Studi tentang Masa Mataram II Abad XI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985
- Mulder, Niels. *Pribadi dan Masyarakat di Jawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1996
- \_\_\_\_\_. *Ruang Batin Masyarakat Indonesia*. Alih bahasa Wisnu Hardana. Yogyakarta: LkiS, 2001
- \_\_\_\_\_. *Mistisisme Jawa Ideologi di Indonesia*. Alih bahasa Noor Cholis. Yogyakarta: LkiS, 2001
- Noer, Deliar. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES, 1990
- \_\_\_\_\_. *Pemikiran Politik di Negeri Barat*. Bandung: Mizan, 1998
- Panggabean, Syamsurizal. "Nilai dan Kriteria Proses Demokrasi", dalam Riza Noer Arfani. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996
- Pranoto, Suhartono W.. *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media, 1995
- \_\_\_\_\_. *Serpihan Budaya Feodal*. Yogyakarta: Agastya Media, 2001
- Rapar, JH. *Filafat Politik Plato Aristoteles Augustinus Machiavelli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- Ricklefs, M. C.. *Yogyakarta di bawah Sultan Mangkubumi 1749-1792 Sejarah Pembagian Jawa*. alih bahasa Hartono Hadikusumo dan E. Setyawati. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002
- Rumadi. *Masyarakat Post-Teologi Wajah Baru Agama dan Demokratisasi Indonesia*. Jakarta: PT. Gugus Press, 2002
- Schmandt, Henry J.. *Filsafat Politik Kajian Histories dari Zaman Yunani Kuno sampai Zaman Modern*. alih bahasa Ahmad Baidlowi dan Imam Baehaqi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Simuh. *Sufisme Jawa Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999
- Sosialismanto, Duto. *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama, 2001
- Stange, Paul. *Politik Perhatian Rasa dalam Kebudayaan Jawa*, alih bahasa tim LKiS. Yogyakarta: LKiS, 1998

- Sulistyo, Hermawan. "Antara Teks dan Perilaku Soeharto Sebuah Pengantar" dalam Eriyanto. *Kekuasaan Otoriter dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni Studi Atas Pidato-Pidato Politik Soeharto*. Yogyakarta: Insist, 2001
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia, 1985
- \_\_\_\_\_. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Svalastoga, Kaarc. *Deferensiasi Sosial*. alih bahasa Alimandan. Jakarta: Bina aksara, 1989
- Takashi, Shiraishi. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. alih bahasa Hilmar Farid. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafit, 1997
- Tanter, Richard dan Young, Kennet (ed.). *Politik Kelas Menengah Indonesia*, alih bahasa Noor Imam Subono (dkk.). Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1993
- Uhlenbeek G. M.. *Kajian Morfologi Bahasa Jawa*. alih bahasa Soenarjati Djajanegara. Jakarta: Djambatan, 1982
- Veeger, K.J.. *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Wiertakusumah, Jamaluddin. "Desain Sebagai Simbol : Menggugat Istana Presiden", dalam *Kompas*. Minggu 18 Mei 2003
- Windhu, L. Marsana. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*. Yogyakarta: Kanisius, 2001